

**PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT) ATAS AKTA JUAL-BELI YANG TIDAK TERDAFTAR NOMOR
IDENTIFIKASI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 55 PERATURAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH**

**(STUDI KASUS DI DESA BOJONG MALAKA KECAMATAN
BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Disusun Oleh:

RICHA KARTISA YUSUF

1183050112



uin

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG**

BANDUNG

2022 M / 1443 H